

Pidanakan Pembakar Hutan

YOGYAKARTA – Persoalan kebakaran hutan dianggap sudah terlalu larut tanpa ada upaya penuntasan masalah. Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah sendiri menuntut pemerintah berani melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang sudah seharusnya bertanggung jawab.

"Penegakan hukum dan penutupan izin alih fungsi lahan harus segera dilakukan. Ini bisa menjadi solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Tinggal mendata pemilik lahan yang terbakar. Suruh pemilik bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Kalau masih ber alasan apalagi tidak mau bertanggung jawab, tangkap langsung saja," kata Perwakilan

MLH PP Muhammadiyah Eko Priyo Purnomo PhD.

Dalam Diskusi Publik Kupas Tuntas Bencana Asap di Indonesia di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kemarin, Eko menuturkan pemadaman lahan yang terbakar pun sebenarnya bisa melibatkan masyarakat setempat.

"Dana desa pasti ada. Dari

pada tidak dimanfaatkan, libatkan saja masyarakat untuk ikut membantu memadamkan api, beri mereka insentif dari dana desa yang ada. Kalau memang kekuatan kita sudah tidak cukup, minta bantuan internasional. Gak usah malu, wong memang gak mampu," ujarnya.

Untuk solusi jangka menengah dan panjang, Eko mengatakan perlu adanya pemberian desentralisasi kekuasaan di level pemerintah dengan dilakukan pelaksanaan monitoring secara ketat dan terukur. Selain itu, penguatan komunitas lokal dalam penyediaan lapangan kerja dan pemberian dukungan secara jelas serta konsisten juga perlu dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, dosen Magister Ilmu Hukum UMY Dr Yeni Widowaty SH MHum mengatakan tragedi

bencana asap akibat kebakaran hutan sudah tidak perlu lagi memperdebatkan siapa yang salah. Karena dari aturan yang ada, negara, kementerian, dan gubernur pun memperbolehkan adanya pembakaran hutan.

"Mulai dari UU, PP, dan Pergub, semua membolehkan adanya pembakaran hutan. Dalam aturan memang dijelaskan maksimal 2 hektare dan peruntukannya, tapi siap yang mengawasi jika izinnya saja sangat mudah. Karenanya, saya kira perlu segera dilakukan reformulasi semua aturan terkait lingkungan hidup dan kehutanan," tandasnya.

Yeni menambahkan, tanpa reformulasi aturan tersebut, pembakaran hutan dan lahan gambut ke depan masih akan terusterjadi dan berulang.

● **ratih keswara**